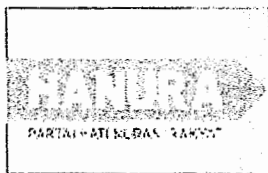


5

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI HANURA**



**TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG  
PERUBAHAN APBD  
TAHUN 2011**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna  
DPRD Propinsi Sumatera Barat  
Kamis , 13 Oktober 2011**

**Dibacakan oleh “ H. SUNARNO GANI, SH ”**

Bismillahhirrahmanirrahim  
Assalam'alaikum Wr. Wb

Yth. Sdr

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Sekretaris Daerah, asisten Staff Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Kanwil, Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat
- Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadiran ALLAH Swt, karena atas rahmat dan karuniaNYA, hari ini kita hadir di gedung Dewan ini dalam rangka melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2011.

Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat hingga kita menjadi makin taqwa Allahumma Salli 'Alla Muhammad, Wa ' Alla ali Sayyidina Muhammad.

**Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 dilatarbelakangi oleh adanya penyesuaian terhadap target pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun penyesuaian terhadap target pendapatan dari dana perimbangan dan lain - lain pendapatan yang sah, selanjutnya adanya penyesuaian terhadap Silpa yang harus digunakan dalam tahun berjalan yang sudah ditetapkan.

Setelah mencermati Nota Pengantar dan Nota Keuangan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, untuk itu kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar merasa perlu menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk dapat menjadi perhatian menetapkan kebijakan dalam kelanjutan pembangunan Prov. Sumbar yang kita cintai ini antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan Nota Pengantar Gubernur Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Ternyata setelah dilakukan perhitungan APBD Tahun Anggaran 2010 sisa lebih Tahun berjalan sebesar Rp 335.221.212.133,14,- melihat kepada sisa waktu anggaran 2011 tinggal <sup>1</sup>1 bulan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Fisik tidak mungkin kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan baik.
2. Fraksi Hanura berharap dan menyarankan Deposito PT.Rajawali sebesar Rp 52.292.334.473 ,uang ini tetap kita

Depositokan di Bank tetapi bunganya kita pergunakan untuk beasiswa pendidikan (SD,SMP,SMA,S1,S2,S3 ) ~~pendidikan berkarakter~~ sebaiknya dibuatkan badan hukumnya untuk mengelola uang ini, Sistim dan Tatacara pemakaiannya mungkin uang ini dikelola oleh Yayasan Pendidikan,dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Sumatera Barat ( SDM ) melalui Beasiswa,

*Sehingga* Pendidikan berkarakter kita jadikan rakyat Sumatera Barat yang Cerdas,Disiplin,berilmu, Berbudaya, Agamis yang berperilaku Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ( ABK-ASBK ) yang selalu kita dengung-dengungkan, dalam program pendidikan berkarakter yang akan lahir di Sumatera barat.

3. Anggaran pendapatan daerah yang semula di anggarkan sebesar Rp. 1.986.576.067.525 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 84.585.128.316,- atau 4,26% kami berharap penambahan anggaran ini dialokasikan kepada kegiatan – kegiatan dan program – program yang dapat meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan ~~da~~ dari pendapatan asli daerah dan harus di arahkan pada usaha – usaha yang terus – menerus dan berlanjut agar pendapatan daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebaiknya juga diiringi dengan peningkatan pengelolaannya yang secara tidak langsung akan mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan ekonomi tanpa memperburuk alokasi dari faktor produksi dan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah salah satunya dapat ditingkatkan melalui intensifikasi pajak daerah dengan memperhatikan atau memprioritaskan peningkatan pajak daerah dan dengan memperhatikan tarif pajak daerah karena tarif pajak dapat menimbulkan pelarian modal ke luar daerah dan dapat memberatkan masyarakat sehingga mengakibatkan pengurangan terhadap penerimaan pendapatan daerah.
5. Kami berharap pemerintah akan dapat meningkatkan lagi pendapatan daerah yang lebih maksimal baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang – peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari. Dan kami juga berharap pemerintah dapat memperbaiki kinerja pengelolaan, pengawasan keuangan sehingga kebocoran dan kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diminimalisir.

6. Untuk urusan pendidikan dana yang dialokasikan dalam APBD awal sebesar Rp. 68.591.883.605,- dan dalam perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. Rp. 3.382.096.667,- atau sebesar 4,93% kami mohon penjelasan saudara gubernur apakah peningkatan alokasi dana di bidang pendidikan ini sejalan dengan peningkatan dari sarana dan prasarana serta fasilitas untuk penunjang kegiatan pendidikan ? Apakah peningkatan dana untuk bidang pendidikan ini dapat juga dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu ? Bagaimana dengan beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu ? kami mengharapkan program pemerintah Daerah Prov. Sumbar tentang pendidikan berkarakter dapat dimulai sejak dini dengan memperhatikan aspek - aspek internal dan eskternal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kiranya Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan mencoba membuat sistem/ draf tentang pendidikan yang memiliki karakter tersebut ? Untuk itu kedepannya kami berharap pemerintah dapat mengalokasikan dana pendidikan bukan lagi untuk wajib belajar 9 tahun tetapi sudah menjadi wajib belajar 12 tahun.
7. Peningkatan alokasi dana di bidang kesehatan juga mengalami peningkatan, kami mengharapkan dengan ditingkatkannya dana untuk alokasi kesehatan peningkatan

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah juga dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, tanpa ada lagi keluhan masyarakat tentang pelayanan Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas yang memberikan pelayanan yang belum maksimal, birokrasi yang panjang dan berbelit - belit, lalai dan lambat melayani pasien Gawat Darurat. Sesuai dengan kenyataan yang banyak kita jumpai saat ini jaminan kesehatan atau Jamkesmas masih belum menyentuh masyarakat, kami mengharapkan pemerintah dapat mengupayakan jaminan kesehatan bagi masyarakat karena kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator yang utama dalam pencapaian sumberdaya manusia Sumbar yang berkualitas.

8. Untuk perencanaan pembangunan mengalami peningkatan sebesar 4,62% , peningkatan alokasi dana ini diharapkan akan dapat meningkatkan perencanaan pembangunan daerah dari segala aspek dengan memperhatikan dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
9. Rencana PT.Semen Padang yang akan meningkatkan bantuan dan sumbangannya untuk Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam rangka peran sertanya mendukung pembangunan Sumatera Barat terutama Peningkatan penerimaan Daerah yang berasal dari Sumbangan dan Partisipasi PT.Semen Padang sesuai dengan Surat dari

Gubernur Nomor : 974/1475/DPKD-2011 tertanggal 26 Agustus 2011. Dengan adanya surat tersebut berarti PT.Semen Padang<sup>harus</sup> komit untuk bersama pemerintah daerah ikut memikirkan dan membantu pembangunan Sumatera Barat ,selalu bergandengan dan berdampingan, mudah-mudahan PT.Semen Padang tidak melupakan sejarah akan kehadirannya di Sumatera Barat.Fraksi Hanura mendukung dan mensuport Pemerintah untuk hal-hal semacam ini.

10. Urusan Kebudayaan yang semula dialokasikan sebesar Rp 16.439.878.100,- mengalami peningkatan sebesar Rp 615.886.440,- atau 3,74 % sehingga menjadi Rp 17.055.764.540,- yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang di dalamnya termasuk anggaran kasi Perfilman, namun sangat disayangkan anggaran Persatuan Artis Film Indonesia ( Parfi ) Sumatera Barat tidak pernah tersentuh padahal Parfi adalah Organisasi di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Patner dari Kasi Perfilman, kami sarankan perlu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membantu dan memikirkannya.
11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terus mendapat perhatian yang khusus dan sungguh-sungguh dari Pemerintah daerah, karena disamping melanjutkan pembinaan terhadap koperasi yang ada dan bantuan untuk usaha kecil menengah yang salah satu ujung tombak untuk meningkatkan ekonomi lemah dan menengah terutama



masyarakat pedesaan yang butuh bantuan dana, sehingga suatu saat pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat dengan sendirinya, diminta petugas lapangan untuk mempunyai data koperasi yang lengkap untuk pembinaan dan kucuran bantuan dana sehingga tidak ada salah sasaran. Kami mengharapkan Koperasi menjadi soko guru perekonomian kita di Sumatera Barat.

12. Sesuai dengan prioritas pembiayaan daerah, sebaiknya pemerintah daerah melakukan alokasi sumber – sumber pembiayaan kepada kegiatan yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan daerah, kami berharap kegiatan – kegiatan tersebut perlu dievaluasi terlebih dahulu, program dan kegiatan tersebut harus sesuai dengan prosedur dan perundang – undangan, dan sesuai dengan jumlah atau porsi belanja yang telah ditetapkan.

Sebagai <sup>Representasi</sup>~~representasi~~ dari masyarakat Sumatera Barat, kami dari Fraksi Partai Hanura sangat mengharapkan sekali peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga tercapainya tujuan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang sejahtera dan kami Fraksi Partai Hanura akan tetap mengawal dan mengawasi seluruh program kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga program – program tersebut bermanfaat dan menyentuh bagi seluruh lapisan masyarakat dan bagi pemerintah daerah program - program tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi partai Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi perhatian Saudara Gubernur , harapan kami didalam merealisasi anggaran nanti agar dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2011 dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih , mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan.

WABILLAH TAUFIG WALHIDAYAH  
WASSALAMMUALAIKUM WR.WB

**Padang, 13 Oktober 2011**  
**FRAKSI PARTAI HANURA**  
**DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Ketua,**

**H. SUNARNO GANI, SH**

**Sekretaris**

**DEDY EDWARD, SE, MM**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2011  
Disampaikan Pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Hari Senin, Tanggal 24 Oktober 2011**

---

**Assalamu,alaikum Wr. Wb.**

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011, sebagai berikut :

**A. PENDAHULUAN**

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa dalam rangka menindaklanjuti KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2011 yang telah disepakati DPRD bersama Pemerintah Daerah, pada tanggal 11 Oktober 2011 Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 untuk dibahas dan disepakati menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2011.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 tersebut, telah dibahas dalam 2 tingkat pembicaraan sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan Rapat Badan Musyawarah bersama Pemerintah Daerah, dimana pada tanggal 13 Oktober 2011 dilaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Jawaban Gubernur terhadap pandangan Umum Fraksi tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011.

Sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 3 Oktober 2011, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat ke II oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD terkait mulai dari tanggal 18 sd. 21 Oktober 2011.

Memperhatikan alokasi waktu tersebut, Badan Anggaran bersama TAPD berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2011, oleh karena secara prinsip pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun 2011 telah mengalami keterlambatan. Untuk itu Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah berupaya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya

sehingga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dapat diselesaikan pada tepat waktu.

## **B. PROSES PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Pembahasan**

Berkenaan dengan itu pencapaian target tersebut, maka kegiatan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yaitu :

- Pertama Rapat Kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan beberapa SKPD terkait yang dipandang perlu dihadirkan dalam rangka mendalami kembali usulan kegiatannya, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
- Kedua Konsultasi ke Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyempurnaan dan pemantapan hasil pembahasan sebagai bahan masukan untuk perumusan Finalisasi hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011.

### **2. Sistem Pembahasan**

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD Tahun 2011, secara prinsip adalah dalam rangka menindaklanjuti dan menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2011 yang telah disepakati ke dalam program dan kegiatan SKPD dengan memperhatikan capaian kinerja masing-masing SKPD serta alokasi waktu yang tersedia untuk pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah kembali melakukan kajian dan pendalaman terhadap kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja daerah yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2011. Hal ini perlu dilakukan, agar betul-betul dapat diperoleh potensi dan postur Perubahan APBD Tahun 2011 yang betul realistis, tepat sasaran dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang sangat terbatas ini.

## **C. HASIL PEMBAHASAN**

Sesuai dengan proses dan tahapan pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

## **I. Gambaran Umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011.**

### **1. Latar Belakang Perubahan APBD Tahun 2011**

Dalam Nota Pengantar, Pemerintah Daerah telah menyampaikan secara menyeluruh latar belakang dilakukannya Perubahan APBD Tahun 2011 antara lain adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang ditetapkan pada KUA APBD Tahun 2011, yaitu adanya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah serta adanya penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2010 yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2011.

Disamping hal tersebut, Perubahan APBD Tahun 2011 juga dilakukan dalam rangka menampung sisa tender yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD serta menampung pergeseran anggaran SKPD dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RKPD tahun 2011.

### **2. Pendapatan Daerah.**

Pada sektor pendapatan daerah, pada APBD awal diproyeksikan sebesar Rp. 1.986.576.067.525,- diperkirakan terdapat peningkatan daerah sebesar Rp.84.585.126.316,-. sehingga proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD menjadi Rp. 2.071.161.195.841,0 dengan rincian sebagai berikut :

#### **a. Pendapatan Asli Daerah.**

Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp. 1.086.756.029.022,- meningkat sebesar Rp. 60.547.740.934,- yang bersumber dari Pajak Daerah Rp.22.000.000.000,-, Retribusi Daerah Rp. 1.754.990.636,-, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp. 18.280.890.176,-. dan Lain-lain PAD sebesar Rp.18.511.860.122,-. Sehingga pada Perubahan Pendapatan Asli Daerah menjadi Rp. 1.147.303.769.956,-

#### **b. Dana Perimbangan.**

Dana perimbangan semula sebesar Rp. 894.605.038.503,0 , terdapat tambahan penerimaan sebesar Rp. 3.035.840.000,- yang bersumber dari pos bagi hasil pajak, sehingga pada Perubahan Dana Perimbangan menjadi Rp. 897.640.878.503,-

#### **c. Lain-lain pendapatan yang sah.**

Lain-lain pendapatan yang sah semula sebesar Rp. 5.215.000.000,- terdapat tambahan sebesar Rp. 21.001.547.382,- yang bersumber dari hibah (Pemda Jawa Timur, PT. Jasaraharja dan dealer kendaraan bermotor, Bantuan dari Kab/Kota) dan tambahan penghasilan guru PNSD.

d. **Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp.211.585.495.480,- meningkat menjadi Rp.335.221.212.133,14,- dimana terdapat penambahan dana dari sisa lebih perhitungan yang lalu sebesar Rp.123.635.716.653,14,-

**3. Belanja Daerah**

Pada pos belanja daerah, semula disediakan sebesar Rp. 2.123.681.661.518,- meningkat sebesar Rp. 205.083.411.983,14 sehingga total belanja daerah pada Perubahan menjadi Rp. 2.328.765.073.501,14, dengan rincian :

1. **Belanja Tidak Langsung**

Pada Pos Belanja Tidak Langsung, semula sebesar Rp. 1.117.210.212.935,- meningkat sebesar Rp. 35.106.258.197,14 sehingga total Belanja Tidak Langsung pada Perubahan menjadi Rp. 1.152.316.471.132,14.

2. **Belanja Langsung.**

Pada Pos Belanja Langsung, semula sebesar Rp. 1.006.471.448.583,- meningkat sebesar Rp. 169.977.153.786,- sehingga total Belanja Langsung pada Perubahan menjadi Rp. 1.176.448.602.369,-

**4. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.**

Pada pos penerimaan pembiayaan, diperkirakan terdapat peningkatan penerimaan yang bersumber dari SILPA tahun 2010 sebesar Rp. 123.635.716.653,14, dimana semula SILPA yang ditetapkan sebesar Rp. 211.585.495.480,- menjadi Rp. 335.221.212.133,14,- yang berasal dari Kelebihan target pendapatan daerah sebesar Rp.71.442.468.007,04,- Sisa belanja sebesar Rp.216.494.979.523,10,- Pembiayaan Daerah sebesar (Rp.531.659.983,00) dan Deposito PT. Rajawali Corporate sebesar Rp.47.757.216.268,-

Dana Silpa tersebut digunakan untuk menutupi defisit APBD sebesar Rp.257.603.877.660,14,- sedangkan sisanya sebesar Rp.77.617.334.334.473,- digunakan untuk :

- a. Penyertaan Modal pada PT. Bank Nagari sebesar Rp.25.000.000.000,-
- b. Deposito PT. Rajawali sebesar Rp.52.292.334.473,-
- c. Sisa lebih tahun berjalan sebesar Rp.325.000.000,-

**II. Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011**

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah berlangsung dengan alot namun dilandasi dengan semangat kebersamaan

sehingga dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dari pembahasan yang dilakukan, baik terhadap pembahasan Pendapatan Daerah maupun terhadap pembahasan Belanja Daerah, dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

#### **1. Pembahasan Pendapatan Daerah**

Secara umum pendapatan daerah tidak mengalami perubahan, oleh karena sudah tidak mungkin ditingkatkan lagi. Hal ini disebabkan proyeksi yang ditetapkan dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2011, adalah proyeksi yang maksimal dengan memperhatikan potensi sumber-sumber penerimaan yang ada. Namun demikian, dalam proses pembahasan terdapat adanya potensi tambahan pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga dari PT. Semen Padang Padang sebesar Rp. 1.250.000.000,- yang merupakan tambahan terhadap sumbangan pihak ketiga yang dijanjikan oleh pihak direksi PT. Semen Padang.

Namun, oleh karena tidak ada kesesuaian antara besaran yang dijanjikan oleh pihak manajemen PT. Semen Padang dengan yang direalisasikan, maka tambahan sumbangan Pihak Ketiga dari PT. Semen Padang tersebut disepakati belum dimasukkan dalam APBD. Untuk membicarakan permasalahan tersebut, disepakati membentuk Tim Kecil yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Daerah dan perwakilan DPRD yang nantinya akan membicarakannya dengan manajemen PT. Semen Padang.

Meskipun tidak dapat meningkatkan lagi proyeksi pendapatan, Badan Anggaran meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengkaji kembali target pendapatan dari 3 (tiga) BUMD yang ditetapkan dalam APBD awal, oleh karena saat ini kondisi BUMD tersebut sedang dalam proses revitalisasi dan reposisi manajemen. Apabila target pendapatan pada BUMD tersebut masih diwajibkan, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian keserius untuk pembenahan dan pengembangan BUMD tersebut agar mampu memenuhi target yang ditetapkan kepadanya. Demikian juga dengan target yang ditetapkan untuk PT. Pelindo, perlu ada upaya-upaya yang lebih maksimal dari Pemerintah Daerah agar dapat direalisasikan.

Dengan tidak adanya tambahan proyeksi pendapatan daerah, maka disepakati besaran proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2011 yang terdapat dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2011, disepakati sebagai proyeksi total pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2011.

#### **2. Pembahasan Belanja Daerah**

Agar program dan kegiatan masing-masing SKPD yang telah ditampung dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2011 betul-betul tepat sasaran dan dapat dilaksanakan, maka Badan Anggaran bersama TAPD kembali melakukan pendalaman terhadap program dan kegiatan yang telah ada.

Dari pendalaman yang dilakukan, secara umum alokasi anggaran untuk belanja daerah tidak mengalami perubahan, hanya terdapat pergeseran-pergeseran beberapa pos belanja, baik terhadap belanja langsung maupun terhadap pos belanja tidak langsung.

a. Belanja Tidak Langsung

Pada pos belanja tidak langsung, terjadi pergeseran antara belanja tidak terduga dengan belanja bantuan sosial dan bantuan hibah, dimana Pos belanja tidak terduga semula sebesar Rp. 9.421.538.035,14 berkurang sebesar Rp. 750.000.000,- yang digunakan untuk bantuan Pertina Sumbang sebesar Rp. 500.000.000,- untuk pelaksanaan event Pra Pon 18 Tahun 2011 yang bertempat di Kota Padang serta bantuan hibah untuk Yayasan Pendidikan Sekolah Unggul Cendia Kabupaten Agam sebesar Rp. 250.000.000,-.

Disamping itu, sisa alokasi anggaran BNPB sebesar Rp. 4.600.000.000,- yang semula dititipkan pada Pos Belanja Tidak Terduga, ditarik kembali sebesar Rp. 1.541.020.000,- yang digunakan pengadaan sarana dan perlengkapan yang terkait dengan penanganan dan antisipasi bencana.

b. Belanja Langsung

Pada Pos belanja langsung, juga terdapat pergeseran belanja pada beberapa SKPD yang terdiri dari Biro Umum, Biro Humas, BPM, Badan Diklat, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Organisasi, Satpol PP, Inspektorat, Kesbanglinmas, BKD, Sekretariat DPRD dan Kantor Penghubung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang kemudian alokasi anggarannya dialihkan untuk kegiatan renovasi dalam rangka peningkatan pengelolaan Istana Bung Hatta sebesar Rp. 1.100.000.000,-, untuk sosialisasi Perda pada Kantor Satpol PP sebesar Rp. 100.000.000,- serta untuk tambahan pos bantuan sosial sebesar Rp. 235.000.000,- dan tambahan kegiatan pada DPKD dan Biro Hukum masing-masing sebesar Rp. 35.000.000 dan Rp. 30.000.000,-.

Hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD tersebut di atas, selanjutnya dikonsultasikan dengan Dirjen Keuangan Daerah untuk mendapat masukan dan arah lebih lanjut terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2011.

Dari konsultasi yang dilakukan tersebut, diperoleh masukan bahwa secara prinsip Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 telah sesuai dengan ketentuan dan telah mengacu kepada Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011. Disamping itu, Dirjen Keuangan Daerah juga memberikan masukan terhadap



mekanisme dan sistem bantuan hibah dan bantuan sosial yang nantinya akan ditampung dalam APBD tahun 2012.

### III. Struktur Perubahan APBD Tahun 2011

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun 2011, dan setelah difinalisasi kembali sesuai dengan masukan – masukan dari Dirjen Keuangan Daerah, maka disepakati komposisi struktur Perubahan APBD tahun 2011, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	<b>Rp. 2.071.161.195.841,-</b>
a. PAD	<b>Rp. 1.147.303.769.956,-</b>
- Pajak Daerah	Rp. 933.800.000.000,-
- Retribusi daerah	Rp. 32.331.466.136,-
- Hasil Pengelolaan KKD.	Rp. 80.602.797.176,-
- Lain-lain PAD	Rp. 100.569.506.644,-
b. Dana Perimbangan	<b>Rp. 897.640.878.503,-</b>
- Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. 90.617.393.503,-
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 1.609.290.000,-
- Dana Alokasi Umum	Rp. 764.680.895.000,-
- Dana Alokasi Khusus	Rp. 40.733.300.000,-
c. Lain-lain pendapatan yang sah	<b>Rp. 26.216.547.382,-</b>
- Pendapatan hibah	Rp. 7.056.047.382,-
- Bantuan dari Kab/Kota	Rp. 18.835.500.000,-
- Dana Tambahan Penghasilan Guru	Rp. 325.000.000,-
2. Silpa	<b>Rp. 335.221.212.133,14,-</b>
3. Surplus/Defisit	Rp. (257.603.877.660,14)
4. Belanja Daerah	<b>Rp. 2.328.765.073.501,14,-</b>
a. Belanja Tidak Langsung	<b>Rp. 1.151.010.451.132,14,-</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 532.674.804.330,-
- Belanja Bunga	Rp. -
- Belanja Subsidi	Rp. -
- Belanja Hibah	Rp. 44.217.000.000,-
- Belanja Bantuan Sosial	Rp. 95.712.858.185,-
- Belanja Bagi Hasil Kab/Kota	Rp. 402.995.187.630,-
- Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 68.280.082.952,-
- Belanja Tidak Terduga	Rp. 7.130.518.035,14,-

b. Belanja Langsung	Rp. 1.177.754.622.369,-
4. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 335.221.212.133,14
5. Pengeluaran Pembiayaan	<b>Rp. 77.617.334.473,-</b>
- Penyertaan Modal	Rp. 25.000.000.000,-
- Deposito	Rp. 52.292.334.473,-
- Sisa lebih tahun berjalan	Rp. 325.000.000,-
	-----
5. Total APBD	<b>Rp. 2.406.382.407.974,14,-</b>

Demikianlah laporan Badan Anggaran ini yang dapat disampaikan pada Rapat Gabungan Komisi ini.

Padang, 24 Oktober 2011

**BADAN ANGGARAN  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**



KETUA, *P 24/10/11*

Ir. H. YULTEKHNIL, MM

SEKRETARIS,



Drs. NASRAL ANAS